

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Timor Leste adalah sebuah negara baru yang melepaskan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia melalui jajak pendapat yang dilakukan pada Agustus 1999 dan merdeka pada 20 Mei 2002 akan melakukan pemilihan umum untuk yang kedua kalinya. Pemilihan umum Timor Leste 2007 adalah peristiwa konstitusional di Timor Leste dalam menentukan pergantian pemerintahan. Jabatan kepresidenan Xanana Gusmao yang terpilih dalam pemilu pertama kalinya setelah Timor Leste mendeklarasikan diri kemerdekaannya akan berakhir pada tahun 2007. Lebih dari 523 ribu pemilih akan memberikan suara dalam pemilihan presiden Timor Leste yang diadakan pada 9 April 2007 ini. Pemilihan presiden ke dua Timor Leste ini sangat penting, mengingat pentingnya hasil pemilihan ini bagi masa depan Rakyat timor Leste dan memilih seorang pemimpin yang dianggap memiliki figur dan kemampuan untuk memimpin rakyat timor Lorosae serta pemimpin tersebut juga akan menentukan kearah mana sistem pemerintahan nantinya. Untuk yang ketiga dalam tahun ini, rakyat Timor Leste menggunakan hak suaranya dalam pemilu.

Fretilin, partai yang pertama kali didirikan pada bulan Mei 1974 setelah revolusi bunga di Portugal pada 25 April 1974. Tujuan dari revolusi bunga itu untuk memberi kesempatan kepada daerah jajahan Portugis untuk

menentukan nasib sendiri. Baik di Timor-Portugis maupun daerah jajahan Portugis lainnya di Benua Afrika. Revolusi tanpa darah itu melahirkan lima partai politik di Timor-Portugis waktu itu. Fretilin merupakan salah satu partai terbesar yang didukung oleh rakyat jelata yang pertama kali melahirkan cita-cita bagi kemerdekaan di Timor-Portugis waktu itu.¹

Hingga saat ini, Partai Politik Fretilin merupakan suatu organisasi politik yang memiliki nama besar di Timor Leste, selain itu Fretilin merupakan wadah atau organisasi yang didalamnya berisi dengan tokoh-tokoh yang merupakan pemimpin pembebasan bagi kemerdekaan Timor Leste. Dalam hal ini adalah dalam kaitannya dengan pembebasan dari Republik Indonesia. Selain itu pada awal kemerdekaan Timor Leste, Fretilin adalah satu-satunya organisasi politik yang menduduki kekuasaan pemerintahan di sana.

Untuk yang ketiga pada tahun 2007 ini, rakyat Timor Leste menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Kemarin, pemilu legislatif itu dilaksanakan serentak di 700 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh negara. Sebanyak 540 ribu warga mengantre untuk menunggu giliran mencoblos. Penduduk Timor Leste antusias menggunakan hak pilih karena berharap pengambilan suara secara rahasia itu akan membuka jalan baru bagi negara yang perekonomiannya termiskin di Asia tersebut. Pemilu parlemen kemarin merupakan pemilu yang pertama dilangsungkan di Timor Leste sejak lepas dari Indonesia pada 2002. Sebelumnya, pada April dan Mei lalu, di Timor Leste berlangsung pemilu presiden yang berlangsung dua putaran.

¹ *Tinjauan Terhadap Gerakan Fretilin : Sejarah dan Masa Depan*, Buletin La'o Hamutuk, Vol.6 No. 1-2 , April 2005

Hasilnya, Ramos Horta menang dan menggantikan Xanana Gusmao sebagai Presiden Timor Leste.²

Pada pemilu tahun 2002, Fretilin mendapat kemenangan mutlak yang diraihnya dengan mayoritas 55 kursi (57,4 persen) dari 88 kursi parlemen yang tersedia waktu itu. Kali ini kursi parlemen yang diperebutkan adalah 65 kursi dan dibutuhkan 33 kursi untuk menjadi mayoritas di parlemen, sekaligus menjadi PM baru. Fretilin dan CNRT adalah partai yang paling kuat bersaing dan diikuti Partai Demokrat. Pertarungan berebut suara paling sengit terjadi antara Partai CNRT yang dipimpin Xanana Gusmao dan Partai Fretilin dengan motor penggerak sekjennya, mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri.

Pemilihan umum parlemen Timor Leste yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2007 itu menghasilkan partai Fretilin meraih kemenangan dengan perolehan suara 21 kursi, disusul di tempat kedua oleh Kongres Nasional Rekonstruksi Timor Leste (CNRT) meraih 18 kursi (24,1 % suara), selanjutnya Koalisi Asosiasi Demokrat Timor Leste-Partai Sosial Demokrat (ASDT-PSD) memperoleh 15,8 persen, diikuti Partai Demokrat dengan 11,4 persen. Walaupun memenangi pemilu, Fretilin yang dipimpin oleh mantan PM Mari Alkatiri, tidak bisa serta merta membentuk pemerintah baru, karena suara yang diperolehnya kurang dari 50 persen.³

Konstitusi Timor Leste menyatakan bahwa yang berhak membentuk pemerintahan adalah partai pemenang pemilihan umum. Kalau partai tersebut

² *Harian SURYA*, 3 Juli 2007

³ <http://kompas.com/kompas-cetak/0706/30/opini/3643732.htm>

tidak menang absolut, dia bisa mengajak partai lain untuk membentuk pemerintahan.

Mengetahui hal ini, Ramos-Horta selaku presiden terpilih, mendesak Fretilin dan CNRT untuk membentuk dalam pemerintahan koalisi dan memberi mereka batas waktu untuk mencari penyelesaian. Ramos-Horta pun sempat mengadakan perundingan dengan partai aliansi pimpinan Gusmao dan juga dengan pemimpin Fretilin, Alkatiri. Namun perundingan tersebut masih gagal mencapai kata sepakat soal pembentukan pemerintahan bersama, meskipun Horta sempat mengancam akan mundur dari kursi kepresidenan. Dalam perundingan tersebut, Fretilin tetap bersikeras untuk membentuk pemerintah karena merasa menjadi pemenang pemilihan umum parlemen pada awal Juli lalu. Disamping itu pun sebagian partai di Timor Leste enggan berkoalisi dengan Fretilin. Fretilin yang berkuasa di parlemen saat ini kehilangan dukungan yang turun dari 57% menjadi hanya 29% pada pemilihan tersebut.⁴

B. Pokok Permasalahan

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat diambil suatu pokok permasalahan yaitu: Faktor-faktor apa yang menyebabkan Partai Fretilin Gagal Menguasai Parlemen Timor Leste tahun 2007 ?

⁴ www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=455 - 28k

C. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks pemilihan umum, ada interaksi antara kandidat dengan rakyat sebagai pemilih. Seorang kandidat akan menang karena dia didukung oleh suara rakyat yang besar. Dengan demikian, maka kandidat akan selalu berusaha mendapat suara rakyat dan di lain sisi rakyat akan memilih kandidat yang sesuai dengan kepentingannya. Begitu juga rakyat Timor Leste akan memilih pemimpin yang mereka anggap dapat memimpin rakyat Timor Lorosae serta memenuhi kepentingan mereka.

Guna mendapatkan pemahaman tentang Pemilihan Umum Parlemen Timor Leste, maka kami menggunakan dua kerangka berpikir, yaitu Konsep Partai Politik dan Konsep Koalisi.

Secara Umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁵

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for it's*

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 160

*leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages).*⁶

Untuk itu partai politik menjalankan aktifitas yang penting yaitu berpartisipasi di sektor pemerintahan, dalam artian berusaha mendudukkan orang-orang menjadi pejabat pemerintah. Dalam rangka mencapai hal tersebut partai politik harus mampu mengaitkan input yang berupa tuntutan dan dukungan masyarakat yang dinamis dengan kebijakan output partai secara tepat jika menghendaki mekanisme partai memberi hasil yang diharapkan. Karena itu dibutuhkan elit partai yang mampu mengkonversikan input tadi menjadi output partai seperti program dan kebijakan-kebijakan partai. Bila kepemimpinan partai lemah maka anggota-anggotanya akan cenderung memisahkan diri dan membentuk faksi yang saling berlawanan untuk berebut pengaruh⁷. Menurut Angus Campbell ada tiga variabel utama yang berpengaruh terhadap perilaku individu dalam memilih suatu partai politik, yakni:⁸

a. Identifikasi terhadap partai

Secara psikologis individu memilih suatu partai politik karena adanya kesetiaan dan cintanya terhadap partai politik tersebut. Praktek politik dari partai-partai politik terkadang berbeda dengan platform

⁶ Freidrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltham, Mass : Blaisdell Publishing Company, 1967, hal. 419

⁷ Robert Michels, *Partai Politik : Kecenderungan Oligarkhis dan Birokrasi* (Jakarta : CV. Rajawali, 1984) hal 93

⁸ John H Kessel, "Presidential Campaign Politics", *Coalition strategies and Citizen Response*, (The Dorsey Press 1984), Homewood, Illinois 60430 hal. 283

ataupun citra partai yang ditangkap masyarakat. Tetapi untuk sebagian masyarakat sering masih memiliki kesetiaan tradisional kepada suatu partai karena citra partai tersebut atau karena retorika para pimpinannya. Kesetiaan terhadap suatu partai sering digoyahkan oleh kekecewaan dan ketidakpuasan para pendukungnya sehingga mereka memindahkan pilihan dukungan. Pilihan-pilihan lebih dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan praktis dan pragmatis berupa kepentingan tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kondisi-kondisi sosial seperti pendidikan, standar kehidupan ekonomi, status sosial yang pada akhirnya mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran politik.

b. Isu yang berkembang

Dengan pertimbangan ini individu memilih partai yang mereka anggap layak dan sanggup untuk memimpin pemerintahan. Kelayakan itu ditentukan oleh isu yang sedang berkembang. Perkembangan ini selanjutnya menuntut partai untuk dapat tanggap dan mengetahui siapa dan bagaimana massa yang diharapkan jadi pendukungnya. Partai jadi lebih reformis dan representatif melalui kompromi sedikit demi sedikit terhadap ideologinya masing-masing sehingga partai kehilangan ciri khas ideologinya yang kemudian digantikan dengan lintas kelas-rasional-agama-etnis dan kepentingan.⁹

⁹ Robert Michels, *Political Parties* (The Free Press of Glancoe, 1958) hal. 304-305, dan Maurice Duverger, *Political Parties* (London : Muthuen, 1954) hal. 17

c. Orientasi terhadap calon (kandidat)

Individu dalam memilih partai politik tertentu juga karena didasarkan pada kualitas personal kandidat. Perilaku ini terbagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Kualitas instrumental, dimana pemilih melihat kemampuan kandidat dalam menangani suatu masalah tertentu.
2. Kualitas simbolis, dimana pemilih mempunyai pandangan bagaimana seharusnya pemimpin yang baik seperti misalnya yang jujur, baik hati, sederhana.

Dalam sistem politik lebih dari satu partai agar dapat menguasai pemerintahan. Maka partai politik harus dapat memperoleh mayoritas kursi di parlemen. Partai-partai politik mempunyai daya tarik politik yang tidak sama dalam berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan pengalaman sosialnya yang khas dan latar belakang sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu agar dapat menang dalam pemilu, partai harus memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi dalam hal kepanduan dan konsentrasi dari organisasinya. Kepanduan menentukan daya saing yaitu menggunakan sumber daya dan memanfaatkan arena pertarungan seperti parlemen nasional, pemilihan umum, media massa dan massa pemilih serta kemampuan merumuskan tujuan-tujuan dan menentukan strategi-strategi.¹⁰

¹⁰ Robert Dahl, dalam Miriam Budiarjo,ed., *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta : Gramedia,1981) hal. 108 dan 131

Koalisi adalah kerjasama antar beberapa koalisi untuk memperoleh suara mayoritas di parlemen guna membentuk satu kabinet atau pemerintahan. Koalisi semacam ini biasanya berbentuk pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri, dengan perjanjian bahwa masing-masing partai yang bergabung dalam koalisi memiliki kesempatan atau peluang untuk turut menentukan arah kebijakan yang penting sesuai dengan perimbangan suara dalam koalisi. Pada umumnya, koalisi dibentuk oleh sejumlah partai yang memiliki suara hampir sama, bukan partai yang memiliki mayoritas. Masing-masing partai yang bergabung mendukung dalam koalisi memiliki kesempatan atau peluang untuk turut menentukan arah kebijakan daerah atau negara, dengan menempati jabatan-jabatan tertentu dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan untuk merealisasikan itu semua dibutuhkan kompromi dan lobi politik. Secara ideal koalisi dapat berjalan efektif apabila terjadi titik temu di level paradigmatic, yaitu ideologi, visi, misi, kultur, dan corak kebangsaannya.¹¹

Jika dilihat dari Konsep Partai Politik maka, kesetiaan terhadap Fretilin sebagai salah satu Partai Politik terbesar di Timor Leste mulai luntur dan kehilangan dukungan, hal ini disebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi ekonomi dan stabilitas keamanan dalam negeri terhadap pemerintahan Fretilin hasil pemilu 2002 yang lalu.

¹¹ BN. Marbun, *Kamus Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1981, hlm 17.

Dalam konstitusi Timur Leste, untuk menjadi partai pemerintah, sebuah partai harus memiliki lebih dari 50 persen suara. Dalam kasus pemilihan Perdana Menteri Timur Leste, karena suatu partai politik tidak dapat memenuhi kuota kurang dari 50% suara di parlemen maka dia harus berkoalisi untuk mendapatkan kursi Perdana Menteri. Namun Fretilin menganggap bahwa yang berhak membentuk pemerintahan adalah partai pemenang pemilihan umum, hal inilah yang kemudian mendapat pertentangan dari partai-partai lain, yang menganggap Fretilin tidak mau bekerjasama demi terwujudnya satu pemerintahan kesatuan. Jika CNRT sukses menggandeng ASDT-PSD dan Partai Demokrat, mereka akan menguasai 51,2 persen atau 37 kursi merupakan angka yang cukup untuk mendudukkan kadernya di kursi Perdana Menteri.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka penulis menarik hipotesa sebagai berikut :

Partai Fretilin tidak dapat menguasai parlemen karena citra buruk fretilin pada masa pemerintahan sebelumnya dan tidak adanya dukungan dari partai-partai lain.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis dalam mengulas kajian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menyebabkan kekalahan Partai Fretilin pada Pemilu Parlemen di Timor Leste 2007.
2. Secara khusus penelitian ini ditujukan demi memenuhi persyaratan akademis pada jenjang studi strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, jurusan ilmu hubungan internasional.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*). Dengan studi kepustakaan ini penulis berharap nantinya bisa menemukan data-data dan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sumber data kepustakaan yang penulis gunakan berasal dari berbagai literatur, buku, surat kabar, jurnal, situs internet dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya bisa dipergunakan untuk mengupas masalah ini.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Bila pokok permasalahan telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi yang tegas terhadap pokok permasalahan itu. Bagi penulis sendiri penegasan batasan ini akan

menjadi pedoman kerja. Penegasan ini berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya kericuhan penelitian dan kekaburan wilayah persoalan. Untuk itu data skripsi ini dibatasi sejak akan diselenggarakannya pemilihan Parlemen Timor Leste yaitu masa kampanye pemilu parlemen pada 30 Juni 2007 hingga pasca Pemilihan pemilu parlemen Timor Leste Juli 2007. Tetapi untuk melatarbelakangi ataupun memperjelas bahasan tidak menutup kemungkinan penulis menambah bahan-bahan dari sebelum dan sesudah periode tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab akan berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Kondisi umum Negara Timor Leste, membahas secara detail dinamika, sejarah Timor Leste dan tinjauan umum tentang ekonomi, sosial dan politik Timor Leste.
- Bab III Membahas bagaimana sistem kepartian di Timur Leste dan jalannya pemilu Parlemen di Timor Leste, tahap-tahapan pemilu Parlemen, dan isu-isu kampanye pemilu Parlemen oleh para kandidat.

- Bab IV Dalam bab ini akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekalahan partai fretilin pada Pemilu Parlemen Timor Leste 2007.
- Bab V Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.